

Keterlibatan Generasi Z dalam Pengawasan Partisipatif: Studi Kasus pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Arvisya Clio Fadila *¹
Alya Faradila Rahayu ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
*e-mail : arvisyacliioo@student.ub.ac.id | alya_faradila_@student.ub.ac.id

Abstrak

Pengawasan pemilu di Indonesia umumnya berfokus pada peran kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan efektivitasnya dalam menekan pelanggaran. Studi terkait partisipasi masyarakat juga cenderung menitikberatkan pada perilaku memilih (*voting behavior*), sehingga kajian yang menyoroti keterlibatan Generasi Z dalam pengawasan partisipatif masih relatif terbatas. Padahal, kelompok *digital natives* ini memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi untuk mengawal pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan Generasi Z dalam pengawasan partisipatif di Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta strategi lembaga dan dinamika yang mempengaruhinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring 2025, serta analisis data partisipasi masyarakat (Parmas) triwulan pertama tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Jatim berhasil mendorong partisipasi Gen Z melalui digitalisasi informasi yang adaptif dan pelatihan berbasis daring, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa apatisme politik dan kendala teknis wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ruang digital efektif untuk memicu antusiasme awal, kombinasi dengan ruang kaderisasi fisik yang inklusif-berjenjang menjadi kunci utama dalam merawat komitmen jangka panjang dan mengakomodasi peran aktif Gen Z, termasuk kelompok disabilitas, sebagai aktor pengawas pemilu.

Kata Kunci: *Generasi Z, Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Jawa Timur, Pemilu.*

Abstract

Election oversight in Indonesia generally focuses on the institutional role of the Election Oversight Body (Bawaslu) and its effectiveness in suppressing violations. Studies on public participation also tend to emphasize voting behavior, leaving research on Generation Z's involvement in participatory oversight relatively limited. In fact, this digital native group has great potential to utilize technology in safeguarding elections. This study aims to analyze the forms of Generation Z's involvement in participatory oversight at Bawaslu East Java Province, along with institutional strategies and the dynamics that influence it. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, documentation of the 2025 Online Participatory Inspector Education (P2P) program, and analysis of public participation (Parmas) data from the first quarter of 2026. The results indicate that Bawaslu East Java successfully encouraged Gen Z's participation through adaptive digital information and online-based training, despite facing challenges such as political apathy and regional technical constraints. This study concludes that while digital spaces are effective in triggering initial enthusiasm, combining them with inclusive, tiered physical cadre development spaces is key to maintaining long-term commitment and accommodating the active role of Gen Z, including those with disabilities, as election monitoring actors.

Keywords: *Generation Z, Participatory Oversight, Bawaslu East Java, Election.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi menurunkan kualitas demokrasi serta kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu tidak hanya mengandalkan pengawasan kelembagaan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat

melalui konsep pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya pemilu guna mencegah terjadinya pelanggaran.

Di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu telah menginisiasi berbagai program pengawasan partisipatif, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan komunitas pengawas pemilu, serta kolaborasi dengan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Meskipun demikian, potret keterlibatan kelompok muda, khususnya Generasi Z dalam program-program tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, di mana proporsi pemilih muda dari kalangan Generasi Z menempati angka yang sangat signifikan. Selain itu, keberagaman karakteristik sosial dan geografis masyarakat di Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan partisipasi publik yang inklusif.

Pengawasan partisipatif merupakan bentuk pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dalam struktur Bawaslu, divisi pengawasan dan partisipasi masyarakat bertugas untuk mengawal jalannya pemilu dengan mendorong warga memantau serta melaporkan indikasi kecurangan. Divisi ini berperan strategis dalam mengawal demokrasi dengan fokus utama pada dimensi pencegahan. Upaya Bawaslu Jawa Timur saat ini adalah mentransformasikan fungsi lembaga agar mampu menyediakan ruang pengawasan yang adaptif bagi perkembangan zaman. Riset terdahulu mengenai partisipasi politik anak muda di Indonesia umumnya masih terjebak pada kajian perilaku memilih (*voting behavior*) atau keterlibatan dalam kampanye partai politik. Kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana anak muda memposisikan diri sebagai aktor pengawas pemilu, terutama di tingkat daerah yang kompleks seperti Jawa Timur, masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademis (*research gap*) tersebut dengan menganalisis secara mendalam keterlibatan Generasi Z dalam pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Generasi Z sebagai kelompok demografis yang tumbuh di era digital memiliki karakteristik yang unik dalam merespons isu politik. Generasi ini dikenal sebagai *digital natives* yang akrab dengan teknologi dan media sosial, sehingga memiliki potensi besar dalam mendorong pengawasan publik yang lebih luas, cepat, dan viral. Dengan memahami bentuk keterlibatan, strategi kelembagaan, serta dinamika lapangan yang menyertainya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah baru bagi optimalisasi pengawasan pemilu berbasis kepemudaan di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu pendekatan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga sebagai bagian dari pengawas yang ikut memantau, mendeteksi, dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa pengawasan pemilu tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga formal seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), mengingat luasnya wilayah pengawasan, banyaknya tahapan pemilu, dan kompleksitas pelanggaran yang dapat muncul di berbagai titik.

Secara konseptual, pengawasan partisipatif berakar pada gagasan demokrasi partisipatif yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam kehidupan politik. Dalam pandangan ini, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari partisipasi

yang bersifat simbolik hingga partisipasi yang benar-benar memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks pengawasan pemilu, partisipasi yang diharapkan bukan hanya sekadar menerima informasi atau hadir dalam sosialisasi, tetapi meningkat pada tingkat kemitraan dan keterlibatan aktif dalam mencegah, mendeteksi, serta melaporkan pelanggaran.

Di Indonesia, konsep pengawasan partisipatif mulai mendapat perhatian yang lebih serius dalam beberapa tahun terakhir. Bawaslu tidak hanya menjalankan pengawasan secara struktural, tetapi juga mendorong pelibatan masyarakat melalui berbagai program seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, kampung pengawasan, desa anti politik uang, relawan pengawas, dan kerja sama dengan komunitas sipil maupun lembaga pendidikan. Dalam modul pengawasan partisipatif Bawaslu, ditegaskan bahwa pengawasan semacam ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat melalui penguasaan pengetahuan ke pemilu dan keterampilan pengawasan yang memadai (Bawaslu RI). Artinya, pengawasan partisipatif tidak hanya mengandalkan niat baik masyarakat, tetapi juga dibekali dengan kemampuan teknis yang cukup.

Pengawasan partisipatif memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, memperluas jangkauan pengawasan karena masyarakat yang berada langsung di lapangan dapat melihat praktik-praktik yang mungkin luput dari pengawasan formal. Kedua, memperkuat fungsi pencegahan karena kehadiran masyarakat yang sadar dan aktif dapat menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ketiga, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu. Keempat, memperkuat legitimasi hasil pemilu karena prosesnya diawasi secara bersama-sama. Kelima, membangun budaya politik yang lebih sehat karena masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kualitas demokrasi. Namun demikian, pengawasan partisipatif tidak selalu berjalan dengan optimal. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi politik masyarakat, pemahaman terhadap bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, akses terhadap informasi, serta kepercayaan terhadap lembaga pengawas. Karena itu, pengawasan partisipatif perlu disertai dengan edukasi yang terus-menerus agar masyarakat tidak hanya tahu bahwa mereka boleh ikut mengawasi, tetapi juga memahami cara melakukannya.

Di era digital, pengawasan partisipatif mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kehadiran media sosial, platform pelaporan daring, dan penyebaran informasi yang cepat membuat masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam pengawasan. Dugaan pelanggaran dapat didokumentasikan, disebar, dan dilaporkan dalam waktu singkat. Meski begitu, ruang digital juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, informasi yang tidak terverifikasi, serta kecenderungan partisipasi yang bersifat reaktif dan sesaat. (Bawaslu RI) menekankan bahwa penguatan partisipasi masyarakat juga perlu diikuti dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi agar pengawasan bisa menjangkau lebih luas. Dengan demikian, pengawasan partisipatif di era digital harus dibarengi dengan literasi digital dan literasi politik agar partisipasi masyarakat tetap terarah, kritis, dan bertanggung jawab.

Partisipasi Politik Generasi Z

Generasi Z merujuk pada kelompok individu yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012, yang tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi digital. Karakteristik utama Generasi Z adalah kedekatannya dengan internet, media sosial, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Hal ini mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partisipasi politik Generasi Z tidak lagi terbatas pada aktivitas konvensional seperti memilih dalam pemilu atau mengikuti kampanye, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk partisipasi digital, seperti menyebarkan informasi politik, mengadvokasi isu melalui media sosial, serta terlibat dalam gerakan sosial berbasis daring. Menurut teori *civic engagement*, partisipasi politik generasi muda cenderung lebih fleksibel, berbasis isu, dan tidak selalu terikat pada institusi formal.

Dalam konteks pengawasan pemilu, Generasi Z memiliki potensi besar sebagai agen pengawas partisipatif, terutama dalam mendeteksi dan menyebarkan informasi terkait pelanggaran pemilu secara cepat melalui platform digital. Namun, partisipasi mereka juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi politik, paparan terhadap disinformasi, serta kecenderungan partisipasi yang bersifat sporadis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan Generasi Z dalam politik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kepercayaan terhadap institusi, serta akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mendorong partisipasi mereka perlu disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi generasi ini, misalnya melalui kampanye digital, edukasi berbasis media sosial, serta kolaborasi dengan influencer atau komunitas digital, seperti kampanye pengawasan pemilu melalui platform seperti Instagram atau TikTok dapat meningkatkan keterlibatan Generasi Z karena menggunakan media yang dekat dengan keseharian mereka.

Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam sistem demokrasi elektoral, kehadiran Bawaslu sangat penting karena pemilu selalu mengandung potensi pelanggaran, baik berupa pelanggaran administratif, etik, maupun pidana. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran, menindaklanjuti temuan, serta menyelesaikan sengketa yang muncul dalam proses pemilu. Tugas ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas formal, tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini tercermin dalam berbagai program pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP), sosialisasi pengawasan pemilu, serta pembentukan komunitas pengawas pemilu.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu mencakup seluruh tahapan pemilu. Pada tahap awal, pengawasan dilakukan terhadap pemutakhiran data pemilih dan pencalonan. Pada tahap kampanye, Bawaslu mengawasi kemungkinan pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, pelibatan pihak tertentu secara tidak sah, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu memastikan agar proses berjalan tertib, jujur, dan sesuai prosedur. Dengan cakupan yang sangat luas ini, jelas bahwa pengawasan pemilu membutuhkan dukungan masyarakat. Karena itu, Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif sebagai strategi untuk memperluas jangkauan pengawasan. Melalui berbagai program seperti pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan relawan pengawas, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan pelibatan komunitas, Bawaslu berupaya membangun kesadaran publik bahwa pemilu yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai lembaga penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.

Di tingkat daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang sangat strategis. Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah pemilih yang besar dan karakter sosial yang sangat beragam. Kondisi ini membuat pengawasan pemilu di Jawa Timur menjadi lebih kompleks dan menuntut strategi yang adaptif. Bawaslu Jawa Timur perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk Generasi Z yang jumlahnya besar dan memiliki pola komunikasi yang khas.

Untuk itu, pendekatan digital, komunikasi yang kreatif, serta kolaborasi dengan kampus dan komunitas muda menjadi sangat relevan.

Selain itu, Bawaslu juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan maraknya disinformasi di media sosial. Dalam kondisi seperti ini, kerja sama antara Bawaslu, masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan kelompok muda menjadi sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik, pengawasan pemilu dapat menjadi lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks, yaitu bentuk keterlibatan nyata serta makna partisipasi Generasi Z dalam pengawasan pemilu. Sementara itu, metode studi kasus digunakan untuk menyelidiki secara intensif dan kontekstual mengenai strategi, dinamika, serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan program pengawasan berbasis digital.

Lokasi & Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia serta memiliki karakteristik sosial masyarakat yang sangat beragam. Adapun lini masa penelitian ini mencakup evaluasi program dan dinamika lapangan yang terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, dengan tambahan analisis data mutakhir pada Triwulan Pertama tahun 2026.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan, mekanisme pelaksanaan, realisasi data demografi peserta, serta transformasi digital yang diterapkan lembaga untuk merangkul Generasi Z (khususnya melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P Daring, evaluasi berjenjang pada program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar, Menengah, dan Lanjut).

Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai paling memahami fokus masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai/Staf Struktural Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang bertanggung jawab penuh dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja pengawasan partisipatif.
2. Kader/Peserta P2P Daring 2025 sebagai informan pendukung untuk melakukan konfirmasi silang (*cross-check*) terhadap efektivitas program di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi tiga metode:

- Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)
Dilakukan secara semi-terstruktur dengan pegawai Bawaslu Jatim untuk menggali data mengenai strategi komunikasi adaptif, kendala wilayah, dan kebijakan keberlanjutan program.
- Dokumentasi
Database dan laporan pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring tahun 2025.
Database Rekapitulasi Peserta SKPP Tiga Tingkatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Laporan rekapitulasi kegiatan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Studi Literatur
Mengkaji buku, jurnal ilmiah, regulasi (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), modul pengawasan Bawaslu, serta literatur terkait *youth civic engagement* dan teori media baru.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tiga tahapan interaktif menurut Miles dan Huberman:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah hasil wawancara serta dokumen P2P Daring 2025.

2. Penyajian Data

Menyusun sekumpulan informasi terstruktur ke dalam matriks, tabel demografi, atau narasi kualitatif agar hubungan antar fenomena dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Meninjau kembali reduksi dan penyajian data untuk mengambil intisari temuan, mengujinya dengan teori yang relevan, hingga menghasilkan kesimpulan akhir yang sesuai dengan keterlibatan Generasi Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Jawa Timur

Pengawasan partisipatif merupakan pengejawantahan dari amanat Undang-Undang sekaligus strategi mandat kultural Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawal integritas pemilu. Program ini didesain tidak hanya untuk memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis warga (*civic literacy*). Di Jawa Timur, Bawaslu mengonseptualisasikan gerakan ini ke dalam beberapa program unggulan yang menasar berbagai segmen masyarakat, dengan fokus khusus pada kelompok pemilih pemula dan Generasi Z.

Secara umum, profil pengawasan partisipatif Bawaslu Jatim bertumpu pada beberapa pilar utama berikut:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)

P2P merupakan program kaderisasi unggulan Bawaslu yang dilakukan secara berjenjang. Program ini bertujuan untuk mencetak “kader pengawas” yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai regulasi, kepemiluan, dan pemetaan kerawanan pelanggaran.

2. Pojok Pengawasan (*Supervisory Corner*)

Pojok Pengawasan adalah pusat informasi dan edukasi publik yang disediakan oleh Bawaslu, baik di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota maupun di fasilitas publik seperti kampus dan sekolah. Di tempat ini, masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar dapat mengakses data hasil pengawasan, jurnal, pamflet edukasi, hingga melakukan diskusi santai mengenai isu-isu kepemiluan. Keberadaan Pojok

Pengawasan ini berfungsi membumikan isu pemilu agar lebih dekat dengan aktivitas keseharian anak muda.

3. Forum Warga dan Sosialisasi Tatap Muka

Meskipun penetrasi digital sangat kuat, Bawaslu Jatim tetap menjaga kedekatan kultural melalui Forum Warga. Program ini berbentuk diskusi berbasis komunitas di tingkat lokal (seperti menggandeng kelompok keagamaan, organisasi kepemudaan, komunitas perempuan, dan disabilitas). Forum ini menjadi ruang serap aspirasi sekaligus sarana bagi Bawaslu untuk menerima masukan langsung mengenai dinamika kerawanan di tingkat akar rumput.

Tabel 1. Komparasi Karakteristik Kuantitatif Peserta Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Jawa Timur

No	Nama Program	Total Peserta Terdata	Peserta Aktif/Lolos	Peserta Tidak Aktif/Gugur	Keterangan Khusus (Inklusivitas & Disabilitas)
1.	Pemuda Pemantau Pemilu (P2P) Daring 2025	100	63	37	Berbasis platform digital; berfokus pada efisiensi aksesibilitas wilayah.
2.	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)				
	Tingkat Dasar	547	369	178	Memiliki basis massa terbesar; memfasilitasi 14 penyandang disabilitas peserta pendamping.
	Tingkat Menengah	75	75	0	Seleksi diperketat; memfasilitasi 6 penyandang disabilitas.
	Tingkat Lanjut	14	14	0	Puncak kaderisasi; meloloskan 5 keterwakilan inklusif (2 Daksa, 1 Netra, 1 Rungu, 1 Pendamping).

(Sumber: Data Olahan Peneliti, Diolah dari Database Internal Bawaslu Provinsi Jawa Timur)

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.1, tampak sebuah pola rekrutmen dan retensi kader yang memiliki karakteristik sosiologis yang kontras namun saling melengkapi antara ruang digital (P2P Daring) dan ruang konvensional berjenjang (SKPP).

Pada program P2P Daring 2025, dari total 100 peserta yang terdata, angka drop-out atau ketidakaktifan mencapai 37%. Fenomena ini mengkonfirmasi argumen mengenai platform fatigue dan kedangkalan komitmen politik digital di kalangan Gen Z, di mana kemudahan akses pendaftaran elektronik sering kali tidak diiringi dengan persistensi keterlibatan hingga akhir program. Ruang

digital memberikan fleksibilitas tinggi, namun rentan terhadap bias apatisme sekunder (*secondary political apathy*) karena minimnya interaksi fisik dan ikatan emosional antar-peserta.

Sebaliknya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menunjukkan dinamika struktur piramida terbalik dalam proses seleksinya. Pada Tingkat Dasar, program ini berhasil menjangkau animo yang luar biasa dari 547 peserta di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun angka ketidakaktifan di tingkat dasar ini cukup signifikan (178 peserta atau sekitar 32,5%), SKPP menerapkan mekanisme penyaringan yang ketat untuk naik ke jenjang berikutnya. Proses kurasi sosiologis ini membuahkan hasil yang rigid, di mana pada Tingkat Menengah tersaring 75 peserta terbaik yang seluruhnya (100%) menyelesaikan program dengan status aktif. Puncaknya, pada Tingkat Lanjut, Bawaslu Jatim berhasil meloloskan 14 kader pengawas inti yang memiliki kompetensi teoritis dan praktis tertinggi.

Temuan demografis paling krusial dalam restrukturisasi data ini adalah konsistensi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mengafirmasi asas inklusivitas bagi kelompok disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas tidak sekadar diletakkan sebagai pelengkap syarat administratif di tingkat dasar. Data menunjukkan bahwa dari 14 disabilitas pada SKPP Tingkat Dasar, terdapat 6 orang yang berhasil mempertahankan performanya hingga Tingkat Menengah. Bahkan pada fase puncak di Tingkat Lanjut, aspek inklusivitas ini tetap terjaga secara proporsional dengan meloloskan 5 orang, yang terdiri dari 2 orang penyandang Tuna Daksa, 1 orang Tuna Netra, 1 orang Tuna Rungu, serta 1 orang pendamping disabilitas.

Keberadaan kader inklusif seperti Anas Akbar Nur Hidayah dan Dhini Fitria Hartami, yang tercatat menempuh proses kaderisasi dari Tingkat Dasar hingga menembus Tingkat Lanjut, menjadi bukti empiris bahwa struktur kaderisasi berjenjang konvensional jauh lebih ramah terhadap kelompok rentan dibandingkan dengan pendekatan digital murni yang cenderung mengasumsikan seluruh peserta memiliki kemampuan literasi teknologi dan aksesibilitas perangkat yang seragam. Integrasi demografis ini menegaskan bahwa untuk membangun ekosistem pengawasan partisipatif yang berakar kuat di Jawa Timur, akomodasi terhadap ruang fisik yang inklusif memiliki daya tahan dan kualitas luaran kader yang jauh lebih solid.

Profil dan Demografi Keikutsertaan Generasi Z dalam Program Bawaslu Jatim

Berdasarkan data kuantitatif program P2P Jawa Timur, terdapat temuan menarik mengenai dominasi gender dan latar belakang profesi. Dari total 160 peserta yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota, keterlibatan perempuan mencapai 55,62% (89 peserta), mengungguli laki-laki yang berada di angka 44,38% (71 peserta). Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam gender-inclusive *civic engagement* di kalangan Generasi Z, dimana ruang pengawasan partisipatif tidak lagi didominasi oleh kelompok maskulin. Dari segi pemetaan wilayah, sebaran kuantitas peserta relatif merata (berkisar antara 8-10 peserta per daerah). Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan mencatatkan jumlah peserta tertinggi (10 peserta). Selain itu, mayoritas peserta didominasi oleh kategori "Lainnya" yang secara spesifik diisi oleh Mahasiswa (58,75%), disusul oleh pekerja swasta/wiraswasta (41,25%). Dominasi mahasiswa ini linier dengan karakteristik Generasi sebagai kelompok terdidik yang memiliki political awareness lebih tinggi dan aksesibilitas yang kuat terhadap informasi digital.

Tabel 2. Indikator Demografi

Indikator Demografi	Kategori	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki (L)	71	44,38%
	Perempuan (P)	89	55,62%

Tingkat Keaktifan	Masih Aktif Tidak Aktif	130 30	81,25% 18,75%
Inklusivitas (Disabilitas)	Tuna Daksa Tuna Netra Non Disabilitas	4 4 152	2,50% 2,50% 95,00%
Latar Belakang/Profesi	Swasta Mahasiswa/Lainnya	66 94	41,25% 58,75%
18 Kabupaten/Kota		160	100%

(Sumber: Data Base P2P Jawa Timur oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur)

Bentuk Keterlibatan Generasi Z

Berdasarkan data keikutsertaan peserta dalam program P2P Daring 2025, keterlibatan Generasi Z dalam pengawasan partisipatif di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat dilihat tidak hanya dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari cara mereka terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, penyebaran informasi, dan penguatan kesadaran pengawasan pemilu. Data pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa peserta didominasi oleh kelompok mahasiswa, perempuan, dan peserta yang masih aktif mengikuti program. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Generasi Z hadir sebagai kelompok yang cukup potensial dalam pengawasan partisipatif karena memiliki kedekatan dengan pendidikan, teknologi digital, dan ruang diskusi publik. Keterlibatan Generasi Z dalam pengawasan partisipatif di Bawaslu Provinsi Jawa Timur hadir dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Keterlibatan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
Melalui program P2P Daring, Generasi Z tidak hanya diperkenalkan pada konsep pengawasan pemilu, tetapi juga dibekali pengetahuan mengenai tugas, fungsi, dan ruang kerja pengawasan masyarakat. Program ini menjadi ruang awal bagi mereka untuk memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, melainkan juga memerlukan keterlibatan warga, terutama generasi muda. Dari data yang ada, sebanyak 130 peserta atau 81,25 persen masih aktif mengikuti program, sedangkan 30 peserta atau 18,75 persen tidak aktif. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar Generasi Z yang terlibat masih memiliki minat dan keterikatan terhadap isu pengawasan pemilu. Keaktifan ini penting karena menjadi indikator bahwa program pengawasan partisipatif dapat diterima dengan cukup baik oleh anak muda, terutama bila disampaikan melalui pendekatan daring yang sesuai dengan kebiasaan mereka.
2. Keikutsertaan dalam Proses Pemahaman dan Diskusi Isu Kepemiluan.
Dalam program P2P, peserta tidak hanya menerima materi satu arah, tetapi juga diajak untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, mengenali potensi kerawanan, dan membahas bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah pelanggaran tersebut. Bentuk keterlibatan ini penting karena menunjukkan adanya proses pembelajaran yang tidak berhenti pada transfer informasi, melainkan juga membentuk kesadaran kritis. Generasi Z yang mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa memiliki kapasitas untuk menangkap isu politik secara lebih reflektif. Hal ini membuat mereka tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, dan perspektif baru dalam forum diskusi yang disediakan oleh Bawaslu.

3. **Partisipasi dalam Ruang Digital.**
Sebagai generasi yang tumbuh bersama internet dan media sosial, Generasi Z sangat akrab dengan cara-cara komunikasi digital. Dalam konteks pengawasan partisipatif, kedekatan ini menjadi modal penting karena mereka dapat terlibat dalam penyebaran informasi, edukasi publik, dan pengawasan berbasis media sosial. Mereka bisa membagikan ulang informasi resmi dari Bawaslu, membuat konten sederhana tentang pentingnya pengawasan pemilu, atau memberi respons terhadap isu-isu pelanggaran yang muncul di ruang digital. Keterlibatan seperti ini memang tidak selalu terlihat secara formal, tetapi justru sangat relevan dengan pola komunikasi generasi muda saat ini. Melalui media sosial, pesan pengawasan dapat menjangkau sesama anak muda dengan lebih cepat dan lebih mudah dipahami.
4. **Peran Sebagai Penyambung Informasi Di Lingkungan Sosial Mereka.**
Peserta yang mengikuti program P2P tidak berhenti sebagai penerima informasi, tetapi berpotensi menjadi perantara pengetahuan bagi lingkungan kampus, organisasi, maupun komunitas tempat mereka berada. Ini berarti bahwa dampak program tidak hanya terbatas pada individu yang mengikuti kegiatan, tetapi dapat meluas ke jaringan sosial yang lebih besar. Sebagai contoh, mahasiswa yang telah memahami bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut kepada teman sekelas, anggota organisasi, atau komunitas diskusi. Dengan cara ini, pengawasan partisipatif berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada Bawaslu sebagai lembaga formal.
5. **Keikutsertaan Dalam Ruang Yang Lebih Inklusif.**
Data menunjukkan adanya 4 peserta tuna daksa dan 4 peserta tuna netra dalam program P2P Daring 2025. Walaupun jumlahnya tidak besar, keberadaan mereka menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif di Bawaslu Jawa Timur mulai membuka ruang partisipasi yang lebih setara. Hal ini penting karena pengawasan pemilu seharusnya tidak hanya terbuka bagi mereka yang secara fisik dan sosial mudah mengakses program, tetapi juga bagi kelompok yang selama ini sering menghadapi hambatan partisipasi. Dengan demikian, keterlibatan Generasi Z dalam pengawasan partisipatif tidak dapat dilihat hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menjangkau berbagai kelompok secara inklusif.
6. **Keragaman Sosial dan Geografi**
Peserta berasal dari 18 kabupaten/kota dengan sebaran yang relatif merata. Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan menjadi wilayah dengan jumlah peserta tertinggi, masing-masing 10 peserta. Sebaran ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan sudah mulai menjangkau berbagai daerah di Jawa Timur. Selain itu, latar belakang profesi peserta yang didominasi mahasiswa dan kelompok swasta menunjukkan bahwa keterlibatan Generasi Z datang dari kelompok yang memiliki aktivitas sosial berbeda, namun sama-sama memiliki peluang untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Keragaman ini penting karena memperlihatkan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya menasar satu kelompok tertentu, tetapi membuka ruang bagi berbagai lapisan anak muda untuk ikut terlibat.

Peran Bawaslu dalam Mendorong Partisipasi

Sebagai lembaga penegak keadilan pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, melainkan juga sebagai fasilitator aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (*civic engagement*). Pelibatan Generasi Z menjadi agenda strategis mengingat dominasi demografis mereka yang sangat besar. Untuk menjembatani jarak antara lembaga formal dan generasi muda yang cenderung dinamis, Bawaslu Jatim menerapkan tiga strategi utama: strategi

komunikasi yang adaptif, program pelatihan yang inklusif, serta kolaborasi berbasis komunitas.

Strategi Komunikasi Adaptif dan Digitalisasi Informasi

Bawaslu Jatim menyadari bahwa Generasi Z adalah digital natives yang mengonsumsi informasi secara visual, cepat, dan berbasis platform digital. Oleh karena itu, strategi komunikasi mengalami pergeseran dari model konvensional (seperti sosialisasi searah atau pembagian brosur fisik) menuju digitalisasi konten yang interaktif.

Bawaslu Jatim mengoptimalkan pemanfaat media sosial (Instagram, TikTok, dan YouTube) untuk mengemas isu-isu pengawasan pemilu yang rumit menjadi konten yang lebih populer dan mudah dipahami, seperti infografis, video pendek (reels), dan podcast. Pendekatan narasi yang digunakan cenderung santai namun tetap edukatif, bertujuan untuk mengikis stigma bahwa pengawasan pemilu adalah hal yang kaku dan membosankan. Melalui komunikasi dua arah di kolom komentar dan pesan langsung, Bawaslu berhasil membangun ruang siber yang inklusif bagi anak muda untuk bertanya dan melaporkan dugaan pelanggaran.

Pelatihan Inklusif Berbasis Kompetensi

Untuk memberikan pemahaman yang substansial, peran Bawaslu diwujudkan melalui penguatan kapasitas (*capacity building*) yang terstruktur. Salah satu instrumen utamanya adalah program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Mengingat luasnya wilayah geografis Jawa Timur, pelaksanaan P2P secara daring pada tahun 2025 menjadi terobosan penting untuk menjangkau Gen Z di berbagai pelosok kabupaten/kota.

Melalui pelatihan daring ini, Bawaslu Jatim memberikan kurikulum yang komprehensif, mulai dari pengenalan regulasi pemilu, pemetaan kerawanan pelanggaran, hingga teknik jurnalisme warga (*citizen journalism*) untuk melaporkan kecurangan (seperti politik uang atau kampanye hitam di media sosial). Model pelatihan ini tidak hanya memosisikan anak muda sebagai objek sosialisasi, tetapi membekali mereka dengan keterampilan teknis agar siap menjadi aktor pengawas di lingkungan digital maupun komunitas lokal mereka sendiri.

Kolaborasi Berbasis Komunitas

Strategi ketiga yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim adalah memperluas jejaring melalui kolaborasi organik dengan berbagai komunitas yang digerakkan oleh anak muda. Bawaslu tidak menunggu Generasi Z datang secara formal, melainkan aktif “menjemput bola” dengan masuk ke ekosistem tempat generasi ini berkumpul.

Meskipun penelitian telah mengidentifikasi tiga strategi utama Bawaslu, penting untuk mendalami mekanisme dibalik efektivitas strategi tersebut, khususnya strategi komunikasi adaptif. Analisis ini mengungkapkan mengapa digital approach resonan dengan Generasi Z secara psikologis dan sosiologis.

Alasan Efektivitas Strategi Digital:

1. *Cognitive Fit* (Kesesuaian Kognitif)

Generasi Z tumbuh dengan konsumsi informasi visual, fragmented, dan real-time. Konten infografis, video pendek (reels), dan podcast dari Bawaslu selaras dengan cara Gen Z memproses informasi, cepat, visual, dan mudah dicerna dalam waktu singkat. Berbeda dengan format konvensional (leaflet, seminar formal), format digital ini mengurangi “*cognitive load*” dan meningkatkan *receptiveness*.

2. *Peer Influence & Social Proof*

Ketika Gen Z melihat konten Bawaslu di Instagram feed mereka (bersama dengan konten dari teman, influencer, dan peer mereka), content tersebut mendapat legitimasi sosial. Ini berbeda dari

sosialisasi formal di auditorium di mana Bawaslu "berbicara ke" Gen Z. Di ruang digital, Bawaslu menjadi "bagian dari percakapan" mereka, bukan speaker eksternal.

3. Agency & Interactivity

Model komunikasi dua arah (kolom komentar, direct message) memberikan Gen Z sense of agency, mereka bisa bertanya, memberikan feedback, bahkan melaporkan langsung tanpa harus datang ke kantor. Ini berbeda dari approach top-down konvensional. Agency ini meningkatkan psychological ownership terhadap program.

4. Relevansi dalam Kegiatan Sehari-hari

Dengan mengemas pengawasan pemilu dalam narasi yang santai dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (misalnya, "Cara spot campaign ilegal di Tik Tok Anda"), Bawaslu berhasil menghubungkan isu formal pemilu dengan *reality* keseharian Gen Z. Hal ini meningkatkan perceived relevance. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa efektivitas jangka pendek (awareness & initial engagement) tidak otomatis berubah menjadi engagement jangka panjang. Data 18,75% *drop-out* menunjukkan bahwa initial *digital attraction* tidak cukup untuk mempertahankan komitmen.

Hal ini meningkatkan relevansi program yang dirasakan (*perceived relevance*) oleh anak muda. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa efektivitas jangka pendek dalam membangun kesadaran digital (*digital awareness*) tidak secara otomatis bertransformasi menjadi komitmen keterlibatan jangka panjang. Adanya data mengenai peserta yang tidak aktif memperlihatkan bahwa daya tarik visual di ruang siber saja tidak cukup kuat untuk merawat persistensi kerelawanan politik Generasi Z. Dinamika mengenai penurunan komitmen keaktifan ini akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya.

Dinamika dan Tantangan di Lapangan: Antara Apatisme Sekunder dan Hambatan Struktural Inklusivitas

Implementasi program pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak luput dari berbagai dinamika dan tantangan elektoral. Berdasarkan restrukturisasi data komparatif antara Pemuda Pemantau Pemilu (P2P) Daring 2025 dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) berjenjang, ditemukan dua tantangan utama yang bersifat kontradiktif namun terjadi secara simultan: yaitu fenomena *secondary political apathy* (apatisme politik sekunder) pada fase rekrutmen massa, serta hambatan struktural akomodasi inklusif pada fase kaderisasi tingkat lanjut.

1. Komitmen Semu dan Fenomena *Secondary Political Apathy* pada Ruang Digital dan Dasar

Salah satu tantangan paling mencolok dalam mendorong partisipasi generasi muda (khususnya Gen Z) adalah tingginya angka ketidakaktifan peserta di awal program. Pada program P2P Daring 2025, angka peserta tidak aktif mencapai 37%, sementara pada SKPP Tingkat Dasar angkanya menyentuh 32,5% (178 dari 547 peserta).

Secara sosiologis, tingginya angka *drop-out* ini mengindikasikan adanya gejala apatisme politik sekunder. Generasi muda memiliki antusiasme yang tinggi pada tahap awal (*initial engagement*) karena kemudahan aksesibilitas pendaftaran berbasis digital atau daya tarik seremonial program dasar. Namun, ketika program memasuki substansi kajian yang membutuhkan komitmen waktu, pemikiran kritis, dan konsistensi, terjadi penurunan motivasi yang drastis.

Pada ruang digital (P2P Daring), ketiadaan interaksi fisik secara langsung memperlemah kontrol sosial dan ikatan emosional antar-peserta, sehingga mereka dengan mudah mengabaikan kelas-kelas pelatihan (*platform fatigue*). Sementara pada SKPP Tingkat Dasar, ketidakaktifan peserta seringkali

dipicu oleh ketidaksiapan mental dalam menghadapi padatnya kurikulum pengawasan pemilu di lapangan. Tantangan ini menunjukkan bahwa kuantitas pendaftar yang melimpah di awal tidak serta-merta mencerminkan kualitas kesadaran politik yang matang.

2. Tantangan Struktural dan Aksesibilitas bagi Kader Inklusif-Disabilitas

Dinamika yang tidak kalah krusial muncul pada fase kaderisasi tingkat menengah dan lanjut. Meskipun Bawaslu Jawa Timur patut diapresiasi karena berhasil mempertahankan 5 kader disabilitas hingga SKPP Tingkat Lanjut (terdiri dari 2 Tuna Daksa, 1 Tuna Netra, dan 1 Tuna Rungu), bertahannya kelompok rentan ini memunculkan tantangan logistik dan metodologis yang kompleks di lapangan.

Ketika seleksi semakin mengerucut dan materi pelatihan berubah dari teoritis menjadi praktis-strategis, hambatan mobilitas dan komunikasi menjadi tantangan nyata:

- Aksesibilitas Fisik (Tuna Daksa): Pelatihan tingkat lanjut menuntut kader untuk mampu melakukan simulasi pengawasan lapangan dan pemetaan kerawanan TPS. Bagi 2 kader Tuna Daksa yang lolos, keterbatasan infrastruktur publik yang ramah disabilitas di lokasi pelatihan maupun di area pengawasan riil seringkali membatasi ruang gerak mereka.
- Hambatan Transfer Informasi (Tuna Netra & Tuna Rungu): Keberadaan 1 kader Tuna Netra dan 1 kader Tuna Rungu di tingkat lanjut memerlukan metode fasilitasi yang sangat spesifik. Keberadaan 1 orang pendamping disabilitas yang terdata dalam tim tingkat lanjut menjadi sangat vital, namun tantangannya adalah ketersediaan modul pelatihan berbasis Braille atau ketiadaan Penerjemah Bahasa Isyarat (PBI) yang bersertifikasi kepemiluan di tingkat lokal.

Tanpa adanya akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), keterlibatan kelompok disabilitas di tingkat lanjut ini rentan terjebak dalam pusaran partisipasi formalistik (tokenisme), di mana mereka dihadirkan secara fisik untuk memenuhi kuota inklusivitas, namun mengalami hambatan struktural untuk menyerap materi secara substantif. Oleh karena itu, konsistensi bertahannya kader seperti *Anas Akbar Nur Hidayah* dan *Dhini Fitria Hartami* dari tingkat dasar hingga lanjut membuktikan perlunya Bawaslu untuk tidak hanya membuka pintu rekrutmen, melainkan juga merombak standar operasional prosedur (SOP) pelatihan agar benar-benar ramah terhadap kebutuhan khusus para kader inklusif tersebut.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Gen Z dalam pengawasan partisipatif di Bawaslu Provinsi Jawa Timur menunjukkan ambivalensi sosiologis yang sangat dipengaruhi oleh desain ruang kaderisasi yang mereka ikuti. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan digital melalui program Pemuda Pemantau Pemilu (P2P) Daring 2025 memang berhasil memicu antusiasme awal Gen Z karena kemudahan aksesnya, namun terlihat bahwa model ini rentan terjebak dalam fenomena *secondary political apathy* dan *platform fatigue* yang memicu angka ketidakaktifan hingga 37%. Sebaliknya, ditemukan bahwa keterlibatan Gen Z menemukan bentuk terbaiknya yang lebih substantif dan persisten melalui model konvensional berjenjang pada program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Struktur seleksi piramida SKPP, yang berhasil menyaring komitmen dari 547 peserta tingkat dasar hingga menyisakan 14 kader pengawas inti di tingkat lanjut, membuktikan analisis ini bahwa kedekatan ruang fisik dan interaksi langsung jauh lebih efektif dalam mengkristalisasi kesadaran politik serta menjaga retensi kepemimpinan anak muda dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, argumen utama yang kami bangun dalam jurnal ini menegaskan bahwa esensi keterlibatan Gen Z yang ideal tidak boleh melepaskan asas inklusivitas terhadap kelompok rentan. Berdasarkan restrukturisasi data yang kami lakukan, dibandingkan dengan ruang digital yang cenderung bias perangkat dan mengeliminasi kelompok disabilitas, model kaderisasi berjenjang SKPP terbukti menjadi ruang yang jauh lebih ramah dan akomodatif bagi pemuda disabilitas. Kami mencatat keberhasilan bertahannya 5 kader inklusif (termasuk penyandang Tuna Daksa, Tuna Netra, dan Tuna Rungu) hingga ke SKPP Tingkat Lanjut sebagai bukti nyata bahwa Gen Z disabilitas memiliki daya tahan politik yang luar biasa jika diberikan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*). Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar arah kebijakan pengawasan ke depan mereduksi model partisipasi yang bersifat formalitas di ruang digital dan beralih pada penguatan kapasitas ruang fisik yang inklusif, sehingga keterlibatan Gen Z dapat bertransformasi dari sekadar angka pendaftaran menjadi kontribusi pengawasan yang nyata dan berdampak bagi demokrasi di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. (2026). Laporan Aktivitas Kegiatan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Kabupaten/Kota Jawa Timur Triwulan I (Januari-Maret 2026). Dokumen Internal.
- Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (2025). Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (2025). Laporan *Data Base P2P* Jawa Timur. Dokumen Internal.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Grand desain pengawasan partisipatif*. Bawaslu RI.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Modul Pengawasan Partisipatif.
https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Buku%20Modul%20Pengawasan_Final.pdf?utm_source=perplexity
- Fauzi, M. dan R. A. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis." *Wacana Politik: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1, 2018.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, 2017.